

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen aset merupakan salah satu topik yang menarik dibicarakan khususnya di Indonesia. Setiap organisasi pemerintah maupun swasta tentunya memiliki aset, baik aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi sektor publik maupun swasta.

Dalam rangka otonomi daerah, seiring dengan perkembangan sebuah organisasi, lembaga atau instansi yang pada saat ini, maka semakin bertambah pula jumlah aset yang dibutuhkan oleh organisasi Lembaga instansi tersebut. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sarana dan perlengkapan kerja yang memadai.

Aset memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah Daerah harus memahami bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan aset adalah terjadinya optimalisasi dalam manajemen aset daerah. Kenyataan sampai saat ini aset daerah masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi belaka (pencatatan akuntansi). Aset daerah masih dikonsultasikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai aset yang produktif dan memberikan pendapatan. Kondisi manajemen terhadap aset daerah tersebut membuktikan bahwa aset daerah sebagai sumber daya lokal daerah menunjukkan utilitasnya yang masih rendah, hal ini terjadi karena di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia belum ada pemahaman pengelolaan aset daerah secara utuh dalam kerangka Manajemen Aset.

Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Menurut Siregar (2018: 518-519) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta optimalisasi aset, di mana jika tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Unit pengelolaan aset sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi perusahaan atau instansi, karena factor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan sistem kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan saran dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu sistem pengelolaan aset dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pegawai kantor Kecamatan Surade.

Kantor kecamatan surade sudah cukup baik dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap, namun ada beberapa aset tetap yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti tanah kosong yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga tanah tersebut tidak terpelihara, adanya aset yang masuk atau berpindah tidak dilaporkan sehingga tidak bisa diinventarisasikan, adanya aset yang tidak diketahui dimana keberadaannya dikaerjakan aset hilang atau dibawa pejabat, dan beberapa peralatan penunjang yang kondisinya rusak tanpa adanya pemeliharaan, serta tidak adanya jadwal yang pasti dan terencana untuk melakukan peninjauan aset hanya berdasarkan laporan tertulis saja. Hal ini tentu saja menjadi penyebab instansi mengalami kesulitan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan aset tetap dimasa yang akan datang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data dari pihak Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Aset Yang Rusak Di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

No.	Barang	Jumlah
1	Proyektor	9
2	Kursi besi	20
3	Meja rapat	3
4	Meja tulis	10
5	Kursi tamu	4
6	Chetos	20
7	Meja biro	5
8	Televisi	2
9	Michrophone	3
10	Printer	8
11	Computer	20
Jumlah		103

(Sumber: Kecamatan Surade, 2022)

Mengingat pentingnya aset tetap dalam suatu instansi dan sebagai salah satu penunjang kegiatan pemerintahan dan berdasarkan fenomena ketidakonsistenan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan aset pada kecamatan surade.
2. Pelaksanaan pengelolaan aset belum memenuhi prinsip-prinsip yang ada.
3. Dari kurangnya pelaksanaan pengelolaan aset berhubungan dengan proses

pengawasan aset tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen aset pada Kantor Kecamatan Surade?
2. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset di Kantor Kecamatan Surade?
3. Seberapa besar pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset di kecamatan surade?

1.4 Tujuan Penelitian

Didasari dari rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen aset pada kantor Kecamatan Surade.
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemanfaatan aset di kecamatan surade.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset di kecamatan surade.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, serta kegunaan yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna bagi Perguruan Tinggi sebagai referensi atau pedoman, bahan pustaka, serta dokumen akademik yang dapat menunjang dalam penelitian selanjutnya, terkhusus dalam penelitian

yang berkaitan dengan pengaruh manajemen aset khususnya pengelolaan aset di kantor Kecamatan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi pengelola aset di Kantor Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan manajemen aset untuk optimalisasi dan pemanfaatan aset yang ada.
- b. Bagi Umum
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi pihak yang membaca dan pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.
- c. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis mengenai penerimaan aset daerah di Kecamatan Surade.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengelolaan manajemen aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah di Kecamatan Surade. Adapun teori yang digunakan pada variabel X adalah teori dari Siregar (2004:518), yang menyatakan manajemen aset yaitu sebagai kumpulan disiplin, metoda, prosedur, perangkat untuk mengoptimalkan dampak keseluruhan atas biaya kinerja dan risiko yang timbul. Selanjutnya penjelasan mengenai komponen manajemen aset, terdapat lima dimensi yaitu sebagai berikut;

1. Inventarisasi aset ada dua aspek dalam inventarisasi aset yaitu yang pertama inventarisasi fisik yang berupa luas, bentuk, lokasi, jumlah atau ukuran, dan lainya. Yang kedua adalah aspek yuridis atau aspek legal, yang mengatur mengenai kepemilikan, hak guna atau kepemilikan dan lainnya.
2. Legal audit: merupakan suatu bagian tugas manajemen aset yang berupa inventarisasi atas kepemilikan aset, termasuk prosedurnya serta permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan legalitas aset.
3. Penilaian aset: proses penilaian pada aset yang dimiliki.
4. Optimalisasi aset: merupakan satu tugas yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan barang milik daerah baik dari segi fisik, jumlah ataupun secara legalitas dan ekonomi. Aset pemda sendiri di golongkan menjadi dua yaitu aset yang memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi.
5. Pengawasan dan pengendalian

Dengan demikian manajemen aset didefinisikan perangkat untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah/aset untuk mewujudkan manajemen aset yang baik maka diperlukan pengelolaan aset sebagai bentuk untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Pengelolaan aset sebagai variabel Y menggunakan teori dari Mardiasmo (2002:238) yang menyebutkan bahwa pengelolaan aset memiliki tiga prinsip dasar dalam pengelolaan kekayaan (aset) daerah, yaitu:

1. Perencanaan: Pencatatan dan pendokumentasian untuk segala pembelian aset atau barang baru.
2. Pelaksanaan: Prinsip efisien, efektifitas, transparan dan akuntabilitas publik, harus diperhatikan dalam pengelolaan aset daerah.
3. Pengawasan: yaitu untuk mengawasi dan menghindari penyimpangan, pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan sampai aset dihapuskan.

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap untuk mengoptimalkan aset tetap. Maka penulis menggamabarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Model Kerangka Pemikiran

